

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Reviu Penelitian Terdahulu

Penilaian kesehatan koperasi berhubungan dengan *benchmarking*. *Benchmarking* merupakan suatu proses pencarian secara berkelanjutan untuk suatu ide dan metode baru, praktik dan proses, serta salah satu usaha mengadaptasi fitur terbaik, kemudian menerapkannya untuk memperoleh hasil terbaik (Nuryskha *et al.*, 2015). *Benchmarking* adalah metode yang banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, secara spesifik dapat diartikan sebagai pencarian berkelanjutan untuk mencari metode mana yang paling efektif untuk menyelesaikan tugas dengan cara membandingkan subunit lain dalam organisasi yang bergerak di bidang yang sama. Hal tersebut berarti *benchmarking* penting dilakukan pada koperasi untuk mendapatkan manfaat dari *benchmarking* diantaranya yaitu informasi baru mengenai perubahan budaya, peningkatan kinerja, serta sumber daya manusia ke arah yang lebih baik.

Studi penilaian kesehatan koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009, mendapatkan hasil bahwa koperasi KPRI Universitas Brawijaya Malang memiliki predikat kurang sehat atau dalam pengawasan, Predikat kurang sehat dikarenakan permodalan, dan tingkat profitabilitasnya memiliki tingkat kesehatan yang kurang baik, dan harus ditingkatkan. Predikat kurang sehat berarti koperasi tersebut harus meningkatkan pengelolaan modal dan menekan biaya operasional. Hal ini diungkapkan oleh, Saraswati dan Dinastya (2013).

Riset oleh Pramono dan Budiyati (2015), melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi menggunakan Peraturan KUKM tahun 2009 pada KSP Tirta Handayani yang menunjukkan tingkat kesehatan kurang sehat, dan dalam kurun waktu tersebut mengalami penurunan skor kesehatan. Tingkat kesehatan kurang sehat tersebut diperoleh karena pada KSP tersebut memiliki

kualitas aktiva produktif rendah yaitu sangat kurang dalam memenuhi pinjaman kepada anggotanya, selain itu pada aspek manajemen kelembagaan belum ada pembagian tugas yang terstruktur dan koperasi belum memiliki Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM tahun 2009, Wijaya (2016) melakukan penelitian pada Koperasi Tuwuh, penelitian tersebut mendapat hasil bahwa koperasi tersebut menunjukkan tingkat kesehatan koperasi yang sehat. Hal ini berarti dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jatidiri koperasi mendapat skor yang baik atau tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan koperasi tersebut diharapkan mempertahankan hasil yang telah diperoleh.

Riset penilaian tingkat kesehatan koperasi dilakukan pada KSP Karya Insan Mandiri berdasarkan Peraturan KUKM Nomor 14 2009, mendapatkan hasil koperasi berada dalam tingkat kesehatan cukup sehat. KSP tersebut memperoleh predikat cukup sehat dikarenakan pada aspek kualitas aktiva produktif, dan aspek likuiditasnya berada dalam kategori dalam pengawasan. Berarti pada koperasi tersebut harus membentuk dana alokasi cadangan berisiko karena hal ini sangat penting untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman tidak lancar dan memperkecil jumlah kas dan bank yang dimiliki yaitu dengan cara menyalurkan dana tersebut ke nasabah dalam bentuk pinjaman. Hal ini diungkapkan oleh Rahayu (2017).

Penilaian kesehatan pada KSP Setia Bhakti mendapatkan hasil cukup sehat, predikat cukup sehat pada KSP tersebut karena pada aspek permodalan dan aspek manajemen umum mendapat tingkat kesehatan yang rendah, sehingga KSP harus mengoptimalkan modal dan asset yang dimiliki koperasi sehingga mampu menghasilkan SHU yang lebih tinggi untuk mensejahterakan anggota dan meningkatkan pengelolaan KSP yang efektif sesuai dengan prinsip koperasi. Penelitian tersebut disampaikan oleh Bhakti dan Harvenda (2018) berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009. Penilaian kesehatan koperasi tersebut masih menggunakan Peraturan Menteri KUKM nomor 14 tahun 2009, karena telah diterbitkan standar baru, maka dalam penelitian ini menggunakan standar peraturan terbaru yaitu Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi**

Tolak ukur kondisi atau keadaan koperasi pada suatu periode tertentu adalah tingkat kesehatan koperasi (Eindrias dan Azizah, 2017). Pada Koperasi Simpan Pinjam, pengukuran tingkat kesehatan koperasi juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan dari Koperasi Simpan Pinjam tersebut. Penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dinilai berdasarkan beberapa aspek atau beberapa indikator yang sudah ditentukan, ada 7 aspek yang terdapat pada Perdep N0.6 /2016.

Penilaian tingkat kesehatan koperasi berhubungan dengan *benchmarking*. *Benchmarking* merupakan suatu proses pencarian secara berkelanjutan untuk suatu ide dan metode baru, praktik dan proses, serta salah satu usaha mengadaptasi fitur terbaik, kemudian menerapkannya untuk memperoleh hasil terbaik (Nuryskha *et al.*, 2015).

### **2.2.2 Jenis Koperasi**

Klasifikasi koperasi sangat diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan yang ditemukan di antara sesama koperasi, baik dari aktivitasnya, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Maka jenis koperasi menurut UU RI No.17 Tahun 2012 pasal 82-84 tentang perkoperasian yaitu:

1. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
2. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
3. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

### **2.2.3 Laporan Keuangan**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan tahun 2009, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan akan melaporkan posisi perusahaan pada satu titik waktu tertentu maupun operasinya selama satu periode tertentu di masa lalu. Laporan keuangan merupakan sebuah cerminan kondisi keuangan perusahaan dengan menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi informasi, maka dari itu sebuah laporan dirasa penting bagi perusahaan untuk melihat kinerja suatu perusahaan (Eindrias dan Azizah, 2017).

### **2.2.4 Bobot Penilaian Aspek dan Komponen Penilaian Kesehatan Koperasi**

Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dapat dilakukan dengan memberikan penilaian dan bobot sesuai dengan besarnya rasio yang diperoleh koperasi. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan

100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.4 :

Bobot Penilaian Aspek dan Komponen Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1.	Permodalan		Total	15
		Rasio modal sendiri terhadap total asset $= \frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	6	
		Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman yang berisiko}} \times 100\%$	6	
		Rasio Kecukupan Modal Sendiri $= \frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2.	Kualitas Aktiva Produktif		Total	25
		Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $= \frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	10	
		Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan $= \frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
		Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah $= \frac{\text{cadangan risiko}}{\text{pinjaman brmasalah}} \times 100\%$	5	

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
		Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $= \frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
3.	Manajemen		Total	15
		1. Manajemen umum	3	
		2. Kelembagaan	3	
		3. Manajemen permodalan	3	
		4. Manajemen aktiva	3	
		5. Manajemen likuiditas	3	
4.	Efisiensi		Total	10
		Rasio beban operasi $= \frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$	4	
		Rasio Beban Usaha Terhadap SHU kotor $= \frac{\text{beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4	
		Rasio Efisiensi pelayanan $= \frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	2	
5.	Likuiditas		Total	15
		Rasio Kas = $\frac{\text{Kas+bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$	10	
		Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima $= \frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5	
6.	Kemandirian dan pertumbuhan		Total	10
		Rentabilitas Aset $= \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$	3	

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
		Rentabilitas modal sendiri $= \frac{SHU \text{ sebelum anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$	3	
		Kemandirian Operasional Pelayanan: $\frac{\text{Partisipasi neto}}{\text{beban usaha} + \text{beban perkoperasian}}$	4	
7.	Jati diri koperasi		Total	10
		Rasio Partisipasi Bruto $= \frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$	7	
		Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)= $\frac{PEA}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$	3	
	<b>TOTAL</b>			<b>100</b>

Sumber : Permen KUKM No.06/ Per/ Dep.6/ IV/ 2016

Penjelasan komponen pada tabel di atas:

a) Permodalan

1. Rasio modal sendiri terhadap total aset, mencerminkan komposisi total aset yang dimiliki oleh Koperasi atas modal sendiri yang dimiliki.
2. Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, Rasio ini menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki Koperasi dalam menjamin pinjaman yang berisiko yang dimiliki koperasi.
3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri, Rasio ini menunjukkan kemampuan modal sendiri tertimbang dimiliki oleh dalam menjamin ATMR. Dalam perhitungan ini, pos-pos dari posisi

aktiva atau aset diperhitungkan berdasarkan bobot risiko dalam bentuk persentase. Nilai nominal dari pos aktiva tersebut adalah nilai bersih pos bersangkutan setelah dikurangi besarnya PPAP khusus maupun Umum.

b) Kualitas Aktiva Produktif

1. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan. Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam memaksimalkan pinjaman kepada para anggota.
2. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan. Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam meminimalkan atas pinjaman bermasalah yang dapat terjadi atas seluruh pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi.
3. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah, rasio ini menunjukkan kemampuan untuk memberikan jaminan atas pinjaman berisiko yang dapat terjadi.
4. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan menunjukkan kemampuan koperasi untuk memberikan jaminan atas pinjaman yang diberikan.

c) Manajemen

1. Manajemen umum
2. Manajemen Kelembagaan
3. Manajemen permodalan
4. Manajemen aktiva
5. Manajemen likuiditas

d) Efisiensi

1. Rasio beban operasi

Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam memaksimalkan atas penggunaan biaya dalam meningkatkan pinjaman kepada para anggota.



Catatan : Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional.

2. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU kotor, rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi untuk melakukan pengendalian beban usaha dengan harapan dapat memaksimalkan SHU kotor yang diperoleh.
3. Rasio Efisiensi pelayanan, rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi untuk melakukan pengendalian biaya karyawan dengan harapan atas volume usaha anggota dihasilkan.

e) Likuiditas

1. Rasio Kas, menunjukkan kemampuan kas dan koperasi yang dimiliki koperasi dalam memberikan jaminan atas kewajiban yang lancar yang harus dipenuhi oleh koperasi.
2. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, menunjukkan kemampuan koperasi dalam meningkatkan dana yang diterima oleh koperasi.

f) Kemandirian dan pertumbuhan

1. Rentabilitas Aset, rasio ini mencerminkan kemampuan koperasi untuk memaksimalkan potensi total aset yang dimiliki dalam rangka untuk menghasilkan SHU sebelum pajak.
2. Rentabilitas modal sendiri, menunjukkan kemampuan koperasi dalam menggunakan total modal sendiri dalam menghasilkan SHU bagian anggota. Kemandirian Operasional Pelayanan, rasio menunjukkan kemampuan koperasi dalam memaksimalkan SHU kotor dengan perbandingan atas beban usaha dan beban koperasi yang harus dipenuhi oleh koperasi.

Catatan: Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota.

## g) Jati Diri Koperasi

1. Rasio Partisipasi Bruto, menunjukkan kemampuan koperasi dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi bruto koperasi.
2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA), kemampuan koperasi untuk memberikan SHU kepada anggota atas dasar simpanan pokok dan simpanan wajib.

**2.2.5 Hasil dari penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi**

Terdapat 7 (tujuh) aspek dalam Peraturan deputi bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/ 2016, ketujuh aspek tersebut akan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 2.2.5

Hasil dari penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi

No	SKOR	PREDIKAT
1.	$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
2.	$66,00 \leq x < 80,00$	Cukup Sehat
3.	$51,00 \leq x < 66,00$	Dalam Pengawasan
4.	$0 < x < 51,00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Permen KUKM No.06/ Per/ Dep.6/ IV/ 2016